

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Populisme sayap-kanan merupakan salah satu ideologi politik yang di-era kontemporer sedang meningkat dalam kontestasi politik domestik negara-negara di tatanan politik internasional. Eropa kemudian menjadi salah satu kawasan yang menjadi titik balik dimana negara-negara mengalami peningkatan populisme sayap-kanan di ranah politik domestiknya. Lebih dari kawasan Eropa negara-negara belahan dunia lain juga mengalami peningkatan kadar populisme sayap kanan di ranah politik domestik negaranya. Amerika-Serikat, dan Kanada kemudian menjadi contoh negara-negara di luar kawasan Eropa yang juga mengalami peningkatan kadar populisme sayap-kanan di politik domestiknya. Peningkatan populisme sayap kanan kemudian tidak hanya terjadi di negara-negara yang memiliki predikat *Global North*, namun negara-negara *Global South* juga mengalami peningkatan kadar populisme sayap kanan. Negara-negara seperti India, Malaysia, dan Indonesia kemudian menjadi negara Global South dengan peningkatan strategi populisme sayap kanan di politik domestiknya.

Penulis kemudian akan menjelaskan beberapa populisme yang terjadi tatanan politik global. Di Prancis Greven (2016) menjelaskan bahwa partai *Front National* atau FN merupakan partai dengan narasi politik sayap kanan ekstrim dengan elemen anti-semitisme di dalamnya. Jean-Marie Le Pen, dan anaknya Marine Le Pen kemudian menjadi tokoh prominen dalam perkembangan FN. Dalam perkembangannya FN kemudian menggeser pesan anti-semitisme nya menuju anti-imigran, dan juga pesan-pesan islamophobia. Gaya kebijakan politik-ekonomi FN juga bergeser dari yang kebijakan yang berbau ekonomi liberal menjadi kebijakan-kebijakan yang berbau proteksionis, anti globalis, dan anti-European Union (EU). Dukungan yang diberikan dari FN di era lampau kemudian berasal dari kelas menengah, pemilik bisnis kecil, dan petani Prancis. Hal ini diakibatkan oleh posisi dari FN yang dahulu sangat mendukung adanya paham ekonomi neoliberal yang mendekati paham social-darwinism. Namun, di era kontemporer FN yang kemudian menggeser kebijakannya menuju nasionalisme anti-EU, dan anti-elitis merubah basis pendukung FN menjadi pekerja kerah biru kulit putih, dan penduduk kulit putih pengangguran di Prancis. Pada tahun 2015, FN menjadi partai terbesar ke-3 (Greven, 2016). Populisme Prancis kemudian memiliki distingsi nasionalis, anti-islam, anti-imigran, dan euro-skeptis.

Amerika Serikat (AS) juga menjadi salah satu negara yang dalam ranah kontestasi politik domestiknya menggunakan strategi populisme sayap kanan yang dominan. Populisme di Amerika Serikat merupakan populisme yang cukup unik menurut (Greven, 2016). Berbeda dengan populisme di kawasan Eropa, bentuk two party system ala AS kemudian seharusnya mencegah adanya disrupsi dari partai lain selain Partai Republikan dan Partai Demokrat. Namun, ketika Donald Trump muncul sebagai nominasi kandidat presidensial dari Partai Republikan, populisme sayap kanan menjadi salah satu diskursus yang sangat sering dibahas dalam komunitas epistemik Ilmu Politik maupun Ilmu Hubungan Internasional. Hal ini dikarenakan partai republik sebagai partai konservatif sering menggunakan strategi-strategi yang memobilisasi emosi masyarakat hingga menciptakan segregasi kultural, rasial, dan lain-lain, seperti yang digunakan oleh partai populisme sayap kadinan. Hal ini dicontohkan seperti strategi “Southern Strategy” ala Presiden Richard Nixon yang berhasil untuk mengakumulasi nilai-nilai rasis wilayah Selatan AS, dan lain-lain (Greven, 2016). Di era kontemporer Presiden Donald Trump dengan slogan “Make America Great Again” merupakan gerakan populisme sayap kanan dengan distingsi patriotis, nativist kulit putih, *Evangelical Christian*, Trumpisme, anti-imigran, dan lain-lain.

Populisme di Swedia kemudian dimanifestasikan oleh *Sverigedemokraterna* atau SD dengan pemimpinnya yang bernama Jimmie Åkesson. SD memiliki basis historis dari partai-partai ekstremis seperti fasisme, dan neo-nazime. Di era kontemporer, Åkesson secara formal mengatakan telah melakukan reformasi internal politik dengan mengeluarkan kurang lebih 100 anggota ekstremis dan melakukan penolakan secara formal terhadap paham-paham tersebut. Pada tahun 2018 SD merupakan partai terbesar ke-3 di Swedia dengan 62 kursi di parlemen Swedia. Pertumbuhan SD sebagai sebuah partai termasuk cukup pesat melihat partai ini baru memasuki kontestasi politik pada tahun 2012. Narasi SD kemudian berkuat pada narasi-narasi *nativist*, anti-imigrasi, dan dukungan kepada sistem sosio-ekonomi Swedia yang berbentuk *Welfare State* (Serioli, 2021).

SD sebagai sebuah partai yang terbentuk pada tahun 2010, mendapatkan suara sebesar 17.5% yang menggeser *status quo* dari partai *centre-left* yang telah mendominasi politik domestik Swedia selama 1 abad (Serioli, 2021). Momentum yang didapatkan oleh SD sebagai partai populisme sayap-kanan terjadi karena krisis Perang Sipil Suriah yang terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Swedia menerima sekitar 163.000 pencari suaka yang langsung diberikan ijin tinggal tetap. Jumlah dari penduduk Swedia yang lahir di luar negeri kemudian naik sebesar 17% yang menjadikan Swedia sebagai negara Skandinavia terbesar, dengan

jumlah penerimaan pengungsi per kapita di Eropa. Permasalahan ini kemudian sangat berperan dalam memobilisasi perasaan masyarakat tentang langkah-langkah politik yang harus diambil demi menjaga ‘keamanan’ kolektif. Masyarakat kemudian menganggap bahwa sumber daya Swedia telah dan akan lebih terbentang tipis karena kehadiran imigran (Serioli, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana populisme di Swedia menjembatani kelompok sayap-kiri, dan sayap kanan?

1.3 Kerangka Pemikiran

Guna menjelaskan keunikan populisme di Swedia dan bagaimana partai populisme di Swedia mengaburkan Batasan antara kaum sayap kiri dan kanan, penulis akan menggunakan 7 kerangka pemikiran; 1. Definisi populisme secara umum; 2. Definisi partai populus dalam diskursus umum populisme; 3. Partai populus sebagai jembatan sayap kiri dan kanan; 4. Sifat *Responsiveness* dan *Responsibility* Partai; 5. Bagaimana SD menjembatani Sayap Kiri dan Kanan; 6. *Responsiveness* dan *Responsibility* Partai Populis; dan 7. *Welfare State* Swedia dan Ide SD tentang *Welfare State*

1.3.1 Partai Populis dalam Diskursus Umum Populisme

Populisme dapat dipahami sebagai sebuah strategi politik yang berusaha untuk menguraikan kompleksitas narasi politik dan lebih mengutamakan narasi emosional (Mudde, 2004). Populisme kemudian membagi masyarakat menjadi dua kubu yang berbeda yaitu *the evil elite* dan *the good people*. Penulis memahami teori Mudde (2004) bahwa populisme juga bisa dimaknai sebagai sebuah *thin centered ideology*. Dalam kaitannya, populisme dapat bergabung dengan ideologi lainnya baik ideologi *thin centered* atau *thick centered* lainnya layaknya unsur kimia Karbon ‘C’.

Dalam diskursus mengenai meningkatnya partai-partai populus di Eropa, kata ‘populis’ lebih mengarah pada populisme sayap-kanan. Secara mendasar populisme sebenarnya dapat mengakomodasi kedua sayap/kubu politik (kanan dan kiri). Namun, dalam *political zeitgeist* masa ini, kata populisme lebih mengarah pada populus nasionalis atau sayap kanan. Hal ini bukan berarti partai populus sayap kiri tidak ada sama sekali. Salah satu contoh partai populus adalah perubahan Partai Demokrat Amerika Serikat Ketika masa pemerintahan Barack Obama pada tahun 2009-2017.

Dalam diskursus saat ini, partai populis kemudian merujuk pada beberapa partai populis sayap kanan seperti *Front National* (FN) yang kemudian berubah menjadi *Rassemblement National* (RN) di Prancis dengan tokoh seperti Jean Marie Le Pen, dan Marine Le Pen; Partai *Vox* di Spanyol; Partai *Alternative für Deutschland* (AfD) di Jerman; *Partij voor de Vrijheid* (PVV) di Belanda; dan *Conservative Party* (Tory) di Inggris dengan Boris Johnson sebagai salah satu tokoh paling prominen.

Menurut Greven (2016) partai politik populis kemudian dapat dipahami sebagai sebuah *style* berpolitik. Secara umum politik populisme berusaha untuk memiliki sebuah branding yang menyatakan atau mengakui bahwa mereka adalah representasi dari mayoritas masyarakat. Namun, secara lebih lanjut gaya politik tersebut tidak langsung mengklasifikasikan sebuah partai kemudian menjadi partai populis. Partai populis kemudian memiliki beberapa ciri seperti 1. Fleksibilitas ideologi jika dibandingkan dengan partai konvensional, 2. Alienasi elit politik, kelas sosial, struktur sosial, struktur pemerintahan dengan atas nama keinginan publik, sebagai narasi sentral dan legitimasi utama dari pergerakan politik mereka.

SD sebagai partai populis memiliki pola yang berbeda dengan partai populis lainnya. Jika dibandingkan dengan RN (FN), dan AfD, SD memiliki nilai internal partai yang menyebabkan strategi politik SD dinilai berhasil jika dibandingkan dengan partai populis lainnya. Nilai RN dan SD secara mendasar adalah sama dengan usaha untuk menjembatani sayap kiri dan kanan, namun nilai pragmatisme SD yang didasari oleh penempatan kewajiban dan tanggung jawab moral kepada masyarakat Swedia secara menyeluruh. RN berusaha untuk menjalankan strategi yang sama, namun tidak mampu untuk menjembatani kedua spektrum politik dikarenakan tidak mampu untuk melakukan kompromi dalam kebijakan migrasi. AfD di sisi lain tidak berusaha untuk menjembatani sayap kiri dan kanan dikarenakan minimnya penggunaan nilai sayap kiri dalam rumusan kebijaksananya.

1.3.2 Partai Populis sebagai Jembatan Sayap Kiri dan Kanan

Sverigedemokraterna (SD) kemudian menjadi partai populis sayap-kanan di Swedia yang menjadi fokus utama penulis. Dalam narasi dan praktik politiknya, SD memadukan unsur narasi politik kaum sayap kiri dan sayap kanan. SD kemudian bukanlah partai pertama yang memadukan narasi dari kedua kubu ini, Friesen (2021) menjelaskan bahwa beberapa partai populis sayap kanan di Kanada seperti *Reform Party of Canada* (RPC), *Canadian Alliance* (CA), dan *Conservative Party of Canada* (Tories) memiliki narasi umum yang mengaburkan Batasan antara kubu sayap kiri dan kanan. Meskipun kemudian mereka memiliki narasi yang

berbeda, namun secara umum Friesen (2021) menjelaskan bahwa partai populis sayap kanan tersebut memadukan unsur ekonomi ala populisme sayap kanan (*kapitalistik/laissez faire capitalism*) dengan pasar sebagai aktor utama dan melakukan penolakan terhadap intervensi negara dalam kegiatan perdagangan, dengan unsur-unsur egalitarian dibidang sosial ala kubu sayap kiri. Secara mendasar, Kanada tidak memiliki unsur nativis, atau eksklusi berdasarkan ras, kultur, ataupun agama dalam narasi-narasi politiknya.

Berbeda 180 derajat dengan Partai populis sayap kanan di Swedia, yang memiliki narasi kebijakan ekonomi ala kubu sayap kiri mendukung kontinuitas sistem ekonomi sosialis demokratis berupa *welfare system* yang telah diterapkan di Swedia. Narasi kebijakan sosio-politis yang ingin diterapkan oleh SD mendukung adanya segregasi/eksklusi berdasarkan ras, kultur, dan agama. Segregasi ini ditujukan kepada imigran terutama yang berasal dari Kawasan Timur Tengah. Kebijakan ini terjadi karena SD memandang bahwa bentukan masyarakat seharusnya homogen dan tidak heterogen. Heterogenitas yang terjadi pada Swedia terjadi karena kaum elit politis yang menciptakan sebuah *favour* terhadap migran. Krisis migran tahun 2015 menyebabkan terjadinya ledakan migrasi ke Swedia yang membebani sistem ekonomi *Welfare State* Swedia. SD berusaha untuk menjaga kontinuitas dari sistem ekonomi tersebut dengan perubahan kebijakan *net immigration law* menjadi kebijakan imigrasi yang lebih *Draconian*.

1.3.3 Sifat Responsiveness dan Responsibility Partai

Dalam menjelaskan fungsi representasi partai dalam demokrasi modern, penulis akan menggunakan Teori Peter Mair (2013) mengenai dua fungsi representasi partai dalam demokrasi. Teori ini merujuk pada Partai dalam pengaturan sistem demokrasi parlementer. 2 fungsi ini adalah *Responsiveness* dan *Responsibility*. 1. *Responsiveness* partai merujuk pada tugas partai untuk mendengarkan dan menyuarakan opini rakyat dalam pembuatan kebijakan. Fungsi ini didefinisikan sebagai fungsi representasi partai, dimana partai bersedia dan memiliki kapasitas untuk membuat mekanisme penyaringan dan mengekspresikan preferensi masyarakat dalam pembentukan kebijakan. 2. *Responsibility* dari partai merujuk pada kegiatan pemerintahan sehari-hari yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur, hukum, dan norma yang berlaku. Hal ini didefinisikan sebagai aksi dan interaksi partai dalam arti kewajiban tugas dan moral dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari yang menghormati konstitusi, perjanjian dengan rezim internasional yang dianut oleh negara tersebut.

1.3.4 Bagaimana SD menjembatani Sayap Kiri dan Kanan di Swedia

Kemampuan SD untuk menjembatani Sayap Kiri dan Kanan di Swedia dapat dijelaskan melalui Teori Mair (2013). Sifat *Responsiveness* SD mengharuskan SD untuk ‘menjawab permasalahan’ yang terjadi di Swedia. Pendukung SD melihat bahwa terbebani nya sistem ekonomi Welfare System milik Swedia terjadi karena ketidakmampuan sistem tersebut untuk berlanjut ketika aliran imigrasi pengungsi secara besar-besaran terus berjalan. Hal ini kemudian diperparah dengan ketidakmampuan imigran Timur Tengah untuk berasimilasi dengan budaya Swedia. Terjadinya heterogenisasi ini ditolak oleh pendukung SD

1.3.5 Responsibility dan Responsiveness dari Partai Populis

Mair (2013) menjelaskan terdapat tekanan terhadap Sifat *Responsiveness* dan *Responsibility* partai yang berkuasa. Tekanan ini terjadi karena dua faktor. 1. Perubahan dalam lingkungan operasi partai, seperti bertambahnya aktor yang menambah tekanan terhadap partai; dan kebijakan atau perjanjian yang diwariskan oleh partai sebelumnya yang berkuasa. 2. Partai sebagai sebuah organisasi memiliki hubungan yang semakin melemah dengan masyarakat. Hubungan ini melemahkan *Responsiveness* dari partai karena partai tidak mampu mengumpulkan atau membaca preferensi pemilih.

Salah satu kritik dari teori Mair (2013) ini adalah ketidakmampuan teori ini untuk menjelaskan kemunculan partai populis. Tetapi, penulis melihat bahwa dalam menjelaskan partai populis tidak mampu atau harus melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap teori partai politik pada umumnya. Penulis melihat bahwa teori dari Mair (2013) masih mampu menjelaskan partai populis dengan variabel yang telah ditawarkan tetapi tidak dengan kesimpulan yang ditawarkan oleh teori tersebut.

Partai populis menjadi aktor yang menambah tekanan terhadap partai pada umumnya. Partai populis memanfaatkan kerenggangan hubungan yang dimiliki oleh partai umum dengan masyarakat untuk menaikkan popularitasnya. Maka dari itu, *Responsiveness* dari partai populis masih menjelaskan fungsi representasi partai. Tetapi, dari segi *Responsibility* partai populis memiliki definisi *Responsibility* yang berbeda. Hal ini dikarenakan partai populis melihat tidak bekerjanya sistem politik tradisional dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan menawarkan alternatif bagi masyarakat. Partai populis mendefinisikan *Responsibility*-nya kepada keinginan masyarakat atau basis pemilihnya. Dalam kasus Swedia dengan SD, maka *Responsibility* dari SD adalah menyuarakan kebijakan nativisme, anti-imigrasi, dan peningkatan *welfare system* Swedia.

Swedia sebagai negara *welfare state* bukanlah sebuah negara dengan sistem ekonomi sosialisme murni melainkan sebuah negara dengan sistem ekonomi korporatisme sosial (Steinmo, 2013). Hal ini dikarenakan adanya kerjasama antara pemerintah dan aktor kapitalis untuk membuat program *welfare* tanpa pajak tinggi kepada aktor kapitalis. Sistem ini tidak melakukan redistribusi kekayaan secara tradisional, namun didesain untuk memoderasi pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat umum mampu melakukan akumulasi kekayaan dari peningkatan upah (Steinmo, 2013). Peningkatan layanan publik tidak terbentuk, dipertahankan, dan didanai oleh pajak redistributif, namun dari kerja keras kelas menengah kebawah itu sendiri (Steinmo, 2013). Narasi ekonomi SD berfokus pada tekanan yang dialami oleh *Welfare System* Swedia yang dari awal mereka telah anggap kecil oleh kehadiran imigran terutama imigran Timur Tengah akibat Krisis Imigran Suriah tahun 2015. SD menginginkan adanya revitalisasi *Welfare System* dengan penghentian arus kedatangan imigran, dan peningkatan *Welfare System* yang ada di Swedia.

1.4 Hipotesis

SD menjembatani Sayap Kiri dan Kanan melalui narasi partai yang menggunakan narasi ekonomi yang ingin mempertahankan sistem ekonomi *Welfare System* Swedia (sayap kiri) dengan cara penghentian *net immigration policy law* yang didukung oleh sayap kanan.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif yang berusaha untuk mencari relasi antara beberapa variabel. Penelitian ini memiliki jangkauan pada tahun 1998 ketika SD terbentuk hingga Juni 2022 dimana skripsi ini ditulis. Skripsi ini ditulis menggunakan data primer yang didapatkan melalui studi literatur, dan *website* SD. Data sekunder didapatkan oleh penulis melalui studi literatur. Dikarenakan ketidakmampuan peneliti dalam menggunakan Bahasa Swedia, peneliti akan menggunakan *Google Translation* sebagai kanal utama translasi literatur Bahasa Swedia.

Skripsi ini akan terdiri dari Bab 1 membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metodologi penelitian. Bab II membahas mengenai *Sverigedemokraterna* atau SD di Swedia sebagai partai populisme sayap kanan di Swedia. Bab III membahas mengenai sifat *responsiveness* SD. Bab IV membahas mengenai sifat *responsibility* SD. Bab V mengenai simpulan.